Tersedia secara online
http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnaskkbarsi
e-ISSN: 2715-7091

PERANCANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KASUS KORUPSI NEGARA DENGAN KONSEP PROGRAMATIK DI JAKARTA

Septian Hadiansyah*, Asri Budiarto*
*Arsitektur, Universitas Indraprasta PGRI

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Jakarta
Correctional Institution
Programmatic
Pragmatic

ABSTRAK

Abstrak: Korupsi negara merupakan tindak pelanggaran yang dilakukan oknum pemerintahan dan organisasi di dalam negeri, pelaku tindak korupsi pada akhirnya akan berakhir di dalam lembaga pemasyarakatan korupsi. Sayangnya saat ini lapas di indonesia belum sepenuhnya menjadi tempat pembinaan pemasyarakatan sebagaimana mestinya, banyak terjadi praktek penyelewengan dan tindakan melanggar peraturan lainnya. konsep secara programatik diharapkan dapat mangatasi permasalahan yang ada dalam seluruh kegiatan lembaga pemasyarakatan.

Alamat Korespondensi:

Septian Hadiansyah
Arsitektur
Universitas Indraprasta PGRI
E-mail: tian.shadiansyah92@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan pada hakekatnya adalah menjadi tempat para pelaku tindak pidana mendapatkan pembinaan dalam rangka memperbaiki diri sebelum akhirnya dikembalikan ke lingkungan masyarakat, lembaga pemasyarakatan terdiri dari beberapa klasifikasi diantaranya yakni penjara yang diperuntukan untuk kasus korupsi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang didalamnya tentu terdapat kasus korupsi negara tentunya juga memiliki beberapa lembaga pemasyarakatan yang didalamnya dikhususkan untuk tindak pidana tersebut, antara lain adalah gedung merah putih dan lapas sukamiskin.

Kedua lembaga pemasyarakatan tersebut

Memang tidak diragukan lagi tingkat keamanannya walau terkadang masih terdengar isu narapidana yang melakukan tindakan penyelewengan dan tindakan menyimpang lainnya yang mana hal tersebut memang berasal dari sumber daya manusia dalam masing-masing lapas.

Belajar dari berbagai permasalahan yang terjadi maka sangat diperlukan penjara dengan konsep programatik guna menekan berbagai permasalahan yang kemungkinan terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, dari bagaimana memperlakukan narapidana hingga sumberdaya manusia yang berada di dalam lapas.

Semua lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki landasan sebagai tempat memanusiakan manusia, berdasarkan buku yang ditulis oleh nelson mandela tentang standar minimum pemasyarakatan yakni “nelson mandela rules” tentang standar minimum perlakuan tahanan.

Ironi yang terjadi dilapangan saat ini adalah dimana seluruh ragulasi dan standar yang sudah dibuat seolah tidak tepat sasaran, lembaga pemasyarakatan kerap menjadi tempat praktik penyelewengan dan tindakan yang melanggar hukum lainnya.

Penulisan perancangaan ini diharapkan dapat menjadi percontohan dalam perancangan sebuah lembaga pemasyarakatan yang dapat menjadi fasilitator dalam membina pelaku tindak pidana, khususnya korupsi negara.

METODE

Perancangan lembaga pemasyarakatan kasus korupsi yang digagas penulis menggunakan metode pendekatan desain secara canocic atau menggunakan sumbu grid, yang digabungkan satu sama lain sehingga nantinya menjadi suatu modul desain yang teratur.

1. Analisa View

Gambar 1. Kondisi eksisting site

Kondisi eksisting tapak dikelilingi oleh sub zona perumahan dan zona pelayanan umum dengan kondisi fisik banyak terdapat pohon yang membuat sekeliling tampak asri, walaupun bukan merupakan zona hijau.

2. Analisa sirkulasi pada tapak

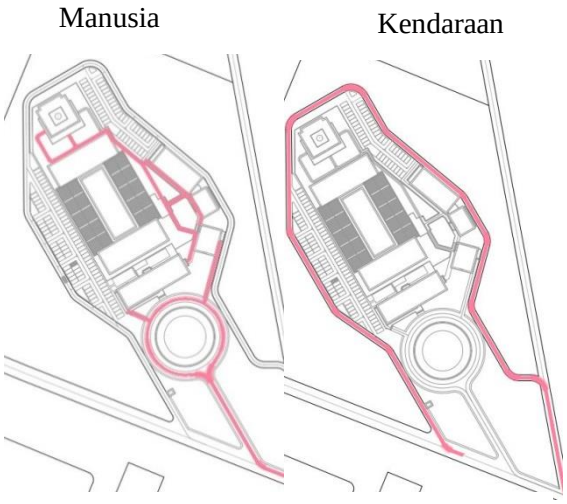

Gambar 2. Konsep sirkulasi

3. Analisa cahaya matahari

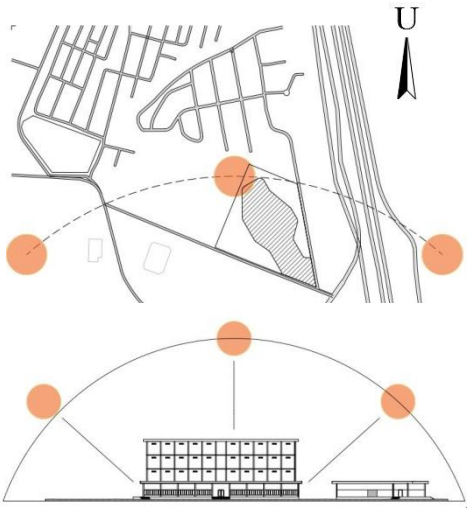

Gambar 3. Analisa Matahari

4. Analisa kebisingan

Gambar 4. Analisa Kebisingan

5. Analisa topografi

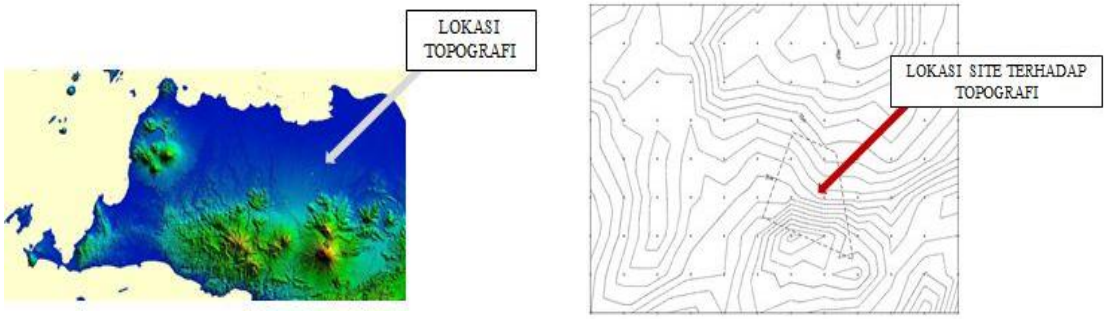

Gambar 5. Analisa Topografi

6. Analisa pencapaian

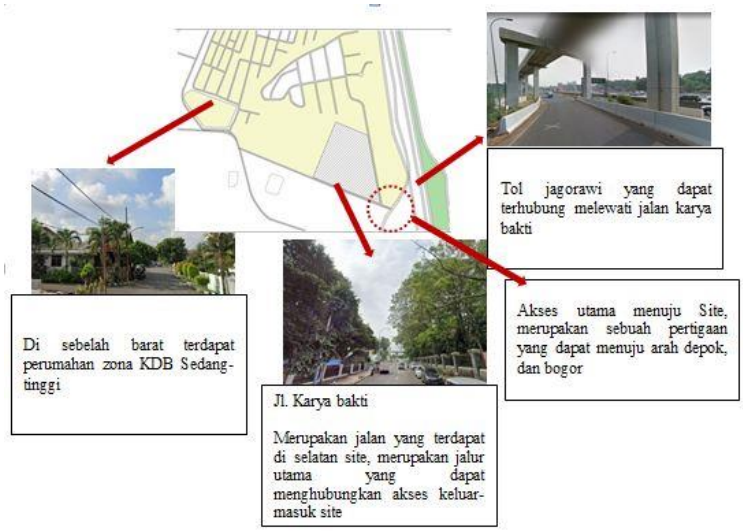

Gambar 6. Analisa Pencapaian

7. Perhitungan lahan terbangun

Berdasarkan peraturan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang intensitas pemanfaatan ruang

a. KDB maksimal 40 persen
b. KLB maksimal 1,60
c. KB maksimal 4
d. KDH 40 persen
e. KTB 45

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan lembaga pemasyarakatan terpidana korupsi negara memiliki perencanaan khusus, hal tersebut dilakukan karena melihat berbagai fakta yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, baik suap tindakan melanggar peraturan lainnya. disamping hal tersebut, cara memperlakukan para tahanan juga menjadi faktor penting dalam perencanaannya.

Pendekatan secara programatik/pragmatis merupakan gagasan yang dipilih guna memenuhi berbagai kebutuhan ruang dan konsep pada bangunan yang nantinya menjadi pendukung aktivitas didalamnya serta menjawab berbagai permasalahan yang ada.

1. Menentukan tujuan dari lembaga pemasyarakatan pidana korupsi sebagai berikut :
   a. Agar kiranya dapat menghasilkan desain lembaga pemasyarakatan yang nantinya menjadi tolak ukur fasilitas lembaga pemasyarakatan.
   b. Agar dapat mengurangi praktik korupsi yang terjadi di berbaga lembaga, khususnya pemerintahan.
   c. menghasilkan desain bangunan lembaga pemasyarakatan dengan sentuhan arsitektur yang dapat mengontrol perilaku dan persepsi ruang serta penghuninnya.
   d. Menjadi sarana kegiatan pemasyarakatan yang baik dan benar secara undang-undang.

Konsep dan teori dalam arsitektur digunakan guna melengkapi berbagai kebutuhan dalam bangunan, khususnya sebagai penunjang aktivitas dalam bangunan lembaga pemasyarakatan.

Konsep programatik adalah langkah awal yang dikembangkan dalam desain guna mangatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup suatu bangunan, dalam hal ini adalah lembaga pemasyarakatan.

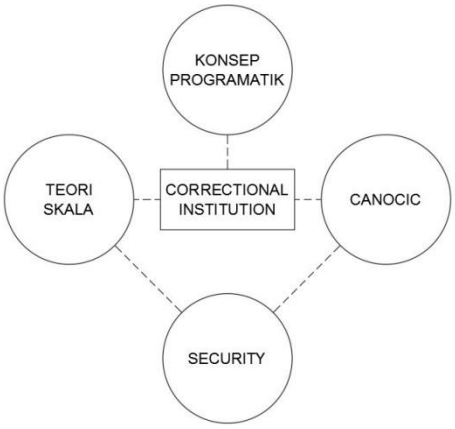

Gambar 7. Kerangka Berpikir Desain

Sebagai bangunan yang didesain guna memberikan pembinaan terhadap para narapidana korupsi, bangunan pada lapas menggunakan teori skala dan konsep programatik, Metode canonik pada bangunan juga digunakan untuk mendapatkan hasil akhir desain pada fisik bangunan, baik denah dan estetika pada bentuk, Teori skala diharap dapat memberikan kesan psikologis terhadap para narapidana.

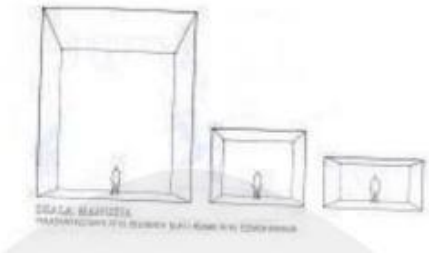

Gambar 8. Teori Skala

Metode canonic memberikan kesan keteraturan pada bentuk bangunan. berawal dari garis lurus yang diposisikan didalam batas site yang asimetris.

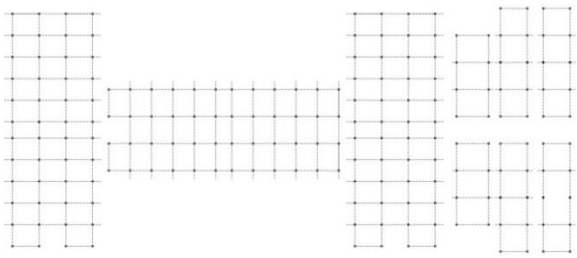

Gambar 9. Desain Grid Bangunan Lapas

Terlihat desain site membentuk form asimetris yang mana memberikan kesan tidak monoton (berulang-ulang). Desain asimetris yang disajikan berupa susunan bangunan yang diposisikan tidak dalam satu titik simetris, disamping menyesuaikan dengan bentuk site.

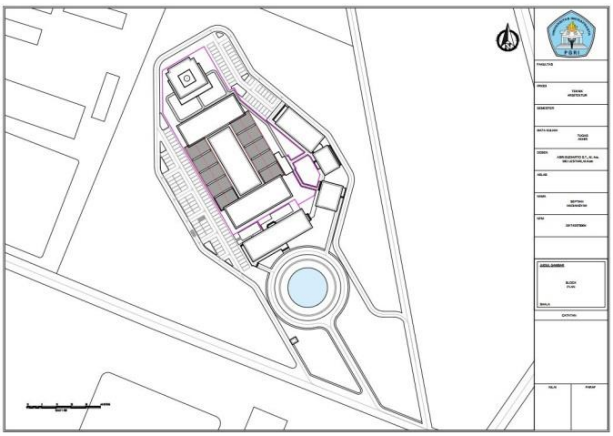

Gambar 10. Site Plan

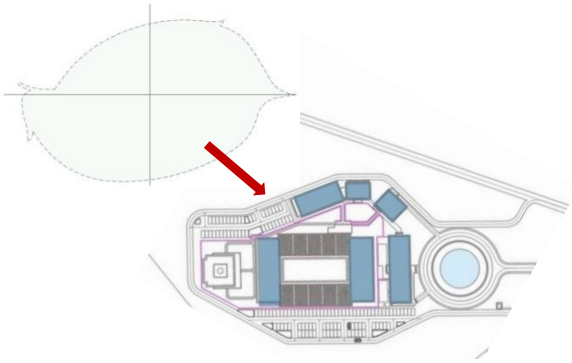

Gambar 11. Contoh Bentuk Asimetris

Merujuk dari peta zonasi yang menunjukan area site merupakan zona bangunan sosial, penulis kemudian melakukan pembuatan boundary lahan sekitar 39,000 m² (3,9 ha) dan kemudian mensimulasikan desain dengan peraturan daerah tentang intensitas pemanfaatan ruang. Lokasi tersebut berada dekat dengan tol jagorawi yang dapat terhubung langsung dengan pusat kota.

Gambar 12. Perspektif bangunan tahanan

Ruang Tahanan

Memiliki luasan rata-rata 10 m² yang mana menjadi tempat terpidana korupsi menjalani masa tahanan dan pembinaan.

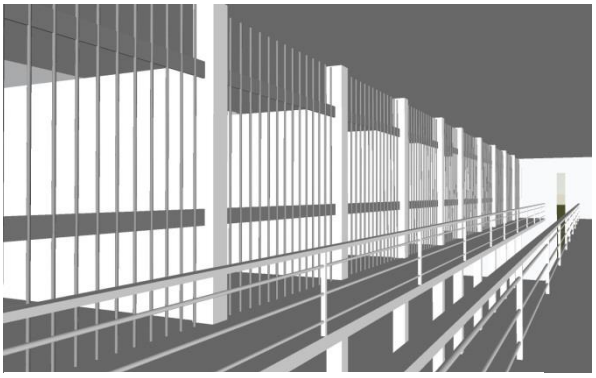

Gambar 13. Ruang Tahanan

Gambar 14. Bird eyed view

Area Parkir

Area parkir terdapat di sebelah barat bangunan lembaga pemasyarakatan dengan persentase 20% parkir luar.

Gambar 15. Area Parkir

Layouting

Lantai 1 merupakan zona segala kegiatan administratif, baik publik maupun semi publik.
Level di lantai 1 juga terhubung dengan masjid dan taman.

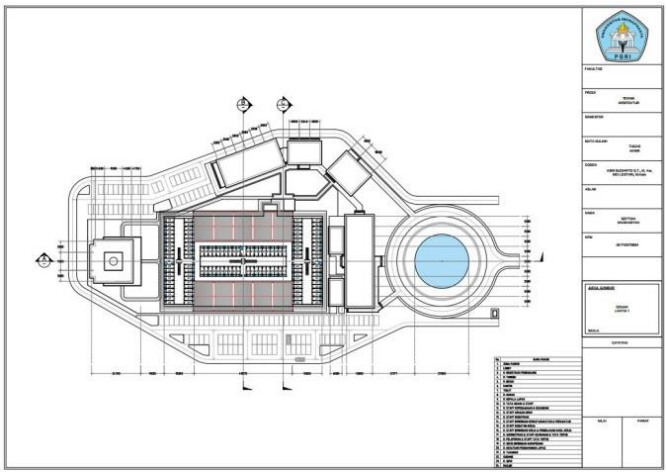

Gambar 16. Denah Lantai 1

Bangunan utama terdiri dari delapan level dengan dua level berada di basement.

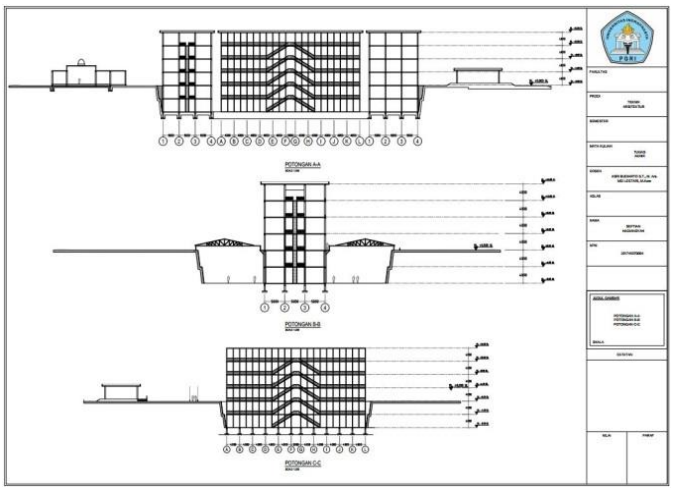

Gambar 17. Potongan & Elevasi

Lantai basement juga merupakan ruang tahanan yang sangat tertutup. Selain letaknya berada di bawah tanah level ini lah yang sangat berpotensi memberikan kesan psikis terhadap narapidana karena letaknya yang berada dibawah tanah (tertutup).

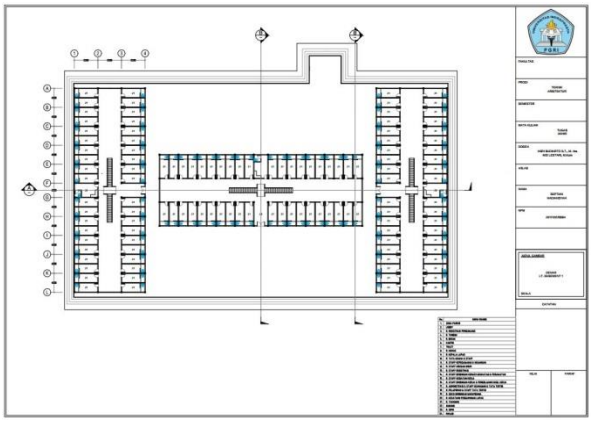

Gambar 18. Lantai Basement

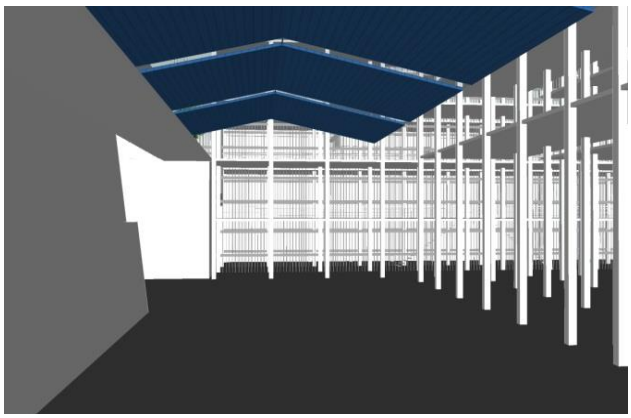

Gambar 19. Ruang Tahanan Bawah Tanah

PENUTUP

Simpulan

Sebagai langkah pencegahan tindakan diluar kendali di dalam lembaga pemasyarakatan, diperlukan desain bangunan yang terprogram. Baik dari metode dan pendekatan dalam mendesain, agar nanti nya tercipta ruang yang dapat mendukung segala aktivitas utama.

Bangunan pemasyarakatan dengan pendekatan yang terprogram diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang menjadi isu saat ini di dalam lembaga pemasyarakatan dan hal melanggar hukum lainnya.

Saran

perancangan lembaga pemasyarakatan ini penulis memberikan saran bahwa dalam desain harus secara terprogram agar dapat terciptanya keamanan dan ruang yang mendukung aktivitas pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

D.K. Ching, Francis (2007). Arsitektur, Bentuk, Ruang, dan Tatanan, Edisi ketiga, Jakarta. Erlangga.

Website

https://dcktrp.jakarta.go.id/beranda/v.1/DCKTRP/perda